

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pancasila sila ke-4 yakni, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam rumusan pertama Pancasila yang diusulkan oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 saat sidang BPUPKI sila ke-3 adalah “mufakat atau demokrasi”. Indonesia adalah negara demokrasi juga ditunjukkan dalam kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan juga pemilihan umum yang sudah kita rasakan. Menurut Franz Magnis – Suseno (2014: 138) menyatakan bahwa:

“Demokrasi adalah satu-satunya hasil dari apa yang disebut reformasi, bahwa yang sekarang dituntut dari kita bukan defaitisme terhadap demokrasi, melainkan tekad untuk meyelamatkan, atau lebih baik, mensukseskan demokrasi kita. Demokrasi – tentu bukan sembarang demokrasi, melainkan demokrasi yang sesuai – cocok untuk bangsa Indonesia atau bahwa bangsa Indonesia sudah jelas harus keluar dari situasi di mana hanya seorang *strongman*, atau seorang *benevolent dictator* (yang dalam kenyataan jarang betul-betul *benevolent*) yang dapat memimpin rakyat Indonesia.”

Namun masalah demokrasi masih dapat kita lihat di negara yang kita cintai ini. Pemilihan umum yang telah dilaksanakan masih ditemukan kecurangan yang terjadi, mulai dari *black campaign* sampai “serangan fajar” yang dilakukan oleh peserta pemilu. Selanjutnya kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab juga menjadi masalah, karena media seharusnya menjadi jembatan penghubung antara pemerintahan dengan warga negara namun banyak ditemukan media yang menjadi provokator dengan membela salah satu kubu partai atau organisasi. Sikap apatis dan apolitik yang ditunjukkan

warga negara yang menjadikan kurangnya sikap demokratis dalam diri warga negara.

Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari sumber daya manusia Indonesia dan sekaligus merupakan aset bangsa yang kelak akan menjadi generasi penerus dalam pembangunan bangsa. Dalam upaya mewujudkan bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, peranan pendidikan tinggi amat penting dan strategis.

Mahasiswa sebagai generasi muda yang setidaknya mempunyai dua kedudukan yang penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, mahasiswa sebagai generasi muda intelektual. Kedudukan ini memberikan mahasiswa dalam posisi penting dan terhormat di dalam kehidupan masyarakat, sebab bagaimana pun juga mahasiswa sebagai makhluk yang terpelajar dan diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang nyata sesuai dengan kemampuan akademisnya.

Kedudukan yang kedua, yaitu mahasiswa sebagai *agent of change* yang mana menjadi kunci pokok dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan roda pemerintahan. Kedudukan yang kedua ini menempatkan mahasiswa sebagai bagian dari proses perubahan dan stabilitator sosial suatu wilayah dimana dia berada. Mahasiswa adalah *agent of change* yang merupakan salah satu kunci dari pola kehidupan suatu masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pendidikan demokrasi yang diberikan untuk mewujudkan itu. Berdasarkan uraian di atas, mahasiswa tentu harus mendapatkan pendidikan demokrasi agar dapat menjadi warga negara yang baik dan cerdas yang turut aktif dalam mengawasi pemerintahan.

Perguruan tinggi atau universitas merupakan tempat pendidikan tertinggi yang dienyam oleh seseorang. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan minat dan kemampuan seseorang. Namun ada mata kuliah umum yang wajib diampu oleh setiap mahasiswa, salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum dasar pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. (Pasal 37 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003)”

Pendidikan Kewarganegaraan salah satu wujud nyata dalam mengimplementasikan proses berdemokrasi berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran/kuliah yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan). Pendidikan Kewarganegaraan juga menjadi salah satu wahana pendidikan demokrasi agar tercipta masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pendidikan demokrasi salah satu bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang diberikan di Universitas. Secara holistic pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda (*young citizens*) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistematis difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang demokrasi (*learning about democracy*), belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi (*learning through democracy*), dan belajar untuk membangun demokrasi (*learning for democracy*). (Winataputra, 2012: 64).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai paradigma baru dimaksudkan pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah serta universitas dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui *civic responsibility*, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan *civic participation*, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggungjawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.

Mahasiswa harus dituntut memiliki ketiga aspek diatas yakni menjadi warga negara yang memiliki kecerdasan, tanggung jawab, dan partipasi sebagai warga negara yang “*smart and good*” sesuai dengan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Namun di Universitas Negeri Jakarta berdasarkan observasi awal penelitian masih menemukan mahasiswa yang kurang dalam ketiga aspek tersebut. Terlihat dari kurangnya tingkat kecerdasan dalam mengetahui tentang konsep demokrasi, nilai-nilai demokrasi, dan system demokrasi. Lalu tanggung jawab sebagai warga Negara juga masih belum terlihat dengan sikap apatis dan apolitik, tidak peduli dengan pemerintah. Serta kurangnya partisipasi dan rasa tanggungjawab mahasiswa sebagai warga negara dalam berdemokrasi, terlihat dari kurangnya antusias dalam pemilihan ketua BEM di Universitas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul tesis **Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi Terhadap Civic Responsibility pada Mahasiswa. (Studi Survey pada Mahasiswa Mata Kuliah Umum di Universitas Negeri Jakarta)**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari observasi awal peneliti di Universitas Negeri Jakarta peneliti melihat masih kurangnya kecerdasan mahasiswa dalam memahami konsep demokrasi, nilai-nilai demokrasi, sistem demokrasi, dan segala sesuatu yang

berhubungan dengan pemerintahan. Selanjutnya peneliti juga melihat tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara yang masih belum terlihat dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Serta juga masih rendahnya sikap partisipasi mahasiswa dengan menunjukkan sikap apatis dan apolitik karena kecewa dengan Pemerintahan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi harusnya menjadi faktor dalam meningkatkan *civic responsibility* dalam diri setiap mahasiswa.

Dengan demikian batasan masalah pada penelitian ini yaitu pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi, *civic responsibility*.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dan batasan masalah tersebut, maka secara umum yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi Terhadap *Civic Responsibility* pada Mahasiswa?” Untuk lebih memfokuskan penelitian yang dilakukan, maka penulis merumuskan beberapa sub-permasalahan sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi terhadap *civic responsibility* pada mahasiswa?
2. Seberapa besar pengaruh metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi terhadap *civic responsibility* pada mahasiswa?
3. Seberapa besar pengaruh media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi terhadap *civic responsibility* pada mahasiswa?

4. Seberapa besar pengaruh sumber pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi terhadap *civic responsibility* pada mahasiswa?
5. Seberapa besar pengaruh evaluasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi terhadap *civic responsibility* pada mahasiswa?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Memperhatikan batasan dan rumusan masalah tersebut, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran empirik tentang pengaruh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi terhadap *civic responsibility* pada mahasiswa, sedangkan secara spesifik penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis:

- a. Pengaruh materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi terhadap *civic responsibility* pada mahasiswa.
- b. Pengaruh metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi terhadap *civic responsibility* pada mahasiswa.
- c. Pengaruh media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi terhadap *civic responsibility* pada mahasiswa.
- d. Pengaruh sumber pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi terhadap *civic responsibility* pada mahasiswa.
- e. Pengaruh evaluasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi terhadap *civic responsibility* pada mahasiswa.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan teoretis dan praktis. Secara teoretis penelitian ini dapat bermanfaat antara lain:

- a. Memberikan pengaruh yang berguna secara teoritis, metodologis, dan empiris bagi kepentingan akademis dalam bidang ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan terutama pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi dan *civic responsibility*.
- b. Dapat dijadikan pola dan strategi dalam meningkatkan perkembangan pendidikan demokrasi di Indonesia khususnya di Perguruan Tinggi.
- c. Dapat dijadikan sebagai alternatif model inovasi dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi terhadap *civic responsibility* pada mahasiswa .

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan:

- a. Informasi bagi para pengelola pendidikan dalam upaya memperbaiki, meningkatkan, dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi.
- b. Bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Indonesia dalam merencanakan, menempatkan, dan melakukan pengawasan serta mengevaluasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi sehingga dapat meningkatkan *civic responsibility* pada mahasiswa di Indonesia.
- c. Masukan bagi Universitas Negeri Jakarta untuk dijadikan pertimbangan secara kontekstual dan konseptual operasional dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan sebagai

pendidikan demokrasi sehingga dapat meningkatkan *civic responsibility*.

E. Struktur Organisasi Tesis

Penulisan tesis dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi Terhadap Civic Responsibility Pada Mahasiswa” ini akan terdiri dari lima bab, yaitu bab I tentang pendahuluan, bab II tentang kajian pustaka, bab III tentang metode penelitian, bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan serta bab V tentang kesimpulan dan rekomendasi. Untuk lebih jelasnya, pembahasan dari kelima bab ini secara singkat dijelaskan di bawah ini.

Bab I Pendahuluan: Bab ini secara rinci mendeskripsikan Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi dan Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Tesis.

Bab II Kajian Pustaka: Pada bab ini terbagi beberapa sub bab yaitu: (1) Menguraikan kerangka konseptual tentang ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan. Topik yang ditulis mengenai Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Komponen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. (2) Konsep Pendidikan Demokrasi. Topik yang ditulis mengenai makna Hakikat Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. (3) Konsep Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi. (4) Konsep *Civic Responsibility*. (5) Penelitian terdahulu yang relevan. (6) Kerangka Pemikiran dan (7) Hipotesis Penelitian.

Bab III Metode Penelitian: Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini mencakup berisi lokasi, populasi dan sampel penelitian, pendekatan, metode penelitian, teknik pengumpulan data, variable penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, analisis dan penafsiran data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Pada bab ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian serta temuan-temuan penelitian, dan pengujian hipotesis.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu: (1) Kesimpulan, dan (2) Saran.